



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin;  
Tempat lahir : OKI - Mangun Jaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 10 Maret 1965;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan PDAM Tirta Musi Lorong Swadaya  
No. 153 RT.8 RW. 3 Kelurahan Bukit  
Lama Ilir Barat I Kota Palembang  
Provinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Pendidikan : S – 1;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan, masing - masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak, tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
8. PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (Tahap I), sejak 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (Tahap II), sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum : Iwed Suprianto, S.H., Bustanul Fahmi, S.H., M.H., Romli Juniawan, S.H., Satria Budiman Alamsyah, S.H. & Alan Pranjaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Safari Law Firm beralamat di Jalan Pemasyarakatan Lr. Setia Budi No. B.3 RT.37 RW.11 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg tanggal tanggal 2 November 2022 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Subsidaritas, berdasarkan surat dakwaan nomor : PDS - 10/L6.11/Ft.1/06/2022 yang dibacakan pada tanggal 05 Oktober 2022 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Hendrik, SP.,M.Si Bin Hadin selaku Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas

Halaman 2 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bersama-sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Kukuh Rekha Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/ L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) *(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)*. Pada kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2019 sampai 2021 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang berada di Jalan Lintas Sumatera KM 3 Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.22/KMA/SKII/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yakni telah membuat pertanggungjawaban fiktif / mark up terhadap pengelolaan dana hibah yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 bertentangan Undang Undang Republik

Halaman 3 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 Ayat (2) yang menyatakan Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi: a. Laporan penggunaan hibah; b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAB III, Pejabat Perbendaharaan Negara, Huruf C Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA, Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia Barang/Jasa, Melaksanakan kegiatan Swakelola, memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya, mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, membuat dan menandatangani SPP, melaporkan pelaksanaan/penyelsaian kegiatan kepada KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu memperkaya diri terdakwa atau orang lain yaitu Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti

Halaman 4 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Kukuh Rekha Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si., Bin Wawan Wiguna yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, Ketua Tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) yang mana dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih adapun dasar pemberian hibah sebagaimana dimaksud adalah naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor :182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor :096/Bawaslu Muratara/2019 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang di tandatangani oleh Bupati Musi Rawas Utara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Saudara Munawir Bin Burhanudin pada tanggal 1 Oktober 2019 dan addendum naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor :182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor :

Halaman 5 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Sehubungan dengan Naskah perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan dana kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 3 tahap sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pada Tahun 2019, sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/770/SPM/BUD/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
  2. Pada Tahun 2020, sejumlah Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/004/SPM/BUD/2020 tanggal 25 Februari 2020;
  3. Pada Tahun 2020, Sejumlah Rp5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/233/SPM/BUD/2020 Tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa pada periode Tirta Arisandi, S.Sos., M.Si Bin Tabrani menjabat sebagai Koordinator Sekretariat/ Pejabat Pembuat Komitmen pada BAWASLU struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
  - ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : Saudara Munawir, S.S Bin Burhanudin (Alm), Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin hasan Basri.
  - ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Periode 21-11-2019 s.d 12-01-2020 adalah Saudari Indri Heryanti, SH setelah itu digantikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sampai dengan Desember 2020.
  - ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kuku Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.
- Bahwa pada periode terdakwa menjabat sebagai Koordinator Sekretariat/ pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum

Halaman 6 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

- ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : Saudara Munawir, S.S Bin Burhanudin (Alm), Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri.
- ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid.
- ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.

- Bahwa pada periode Aceng Sudrajat, S.P., M.Si. Bin Wawan Wiguna menjabat sebagai Koordinator Sekretariat/ pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

- ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : Saudara Munawir ,S.S Bin Burhanudin (Alm), Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri.
- ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid.
- ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 tentang Penunjukan / Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudara Tirta Arisandi, S.Sos, M.Si menggantikan Saudara Dahmuddin, S.IP, M.Si sebagai Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019 selain itu Saudara Tirta

Halaman 7 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisandi, S.Sos, M.Si juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 133/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 (Persiapan tahapan Pilkada 2020) sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kemudian sekira bulan Desember 2019 Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani bersama - sama dengan Saudari Indri Heryanti selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang juga merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5.
- Bahwa uang yang telah di ambil tersebut kemudian seluruhnya dipegang, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani seharusnya tugas untuk menyimpan dan membayarkan ada pada bendahara pengeluaran pembantu.
- Bahwa dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah disimpan serta dikelola oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani berdasarkan laporan realisasi penggunaan anggaran NPHD pada Bawaslu Musi Rawas Utara TA 2019 melalui surat Nomor 167/Bawaslu-Prov.SS-07/TU-00.02/I/2020 kepada Bupati Musi Rawas Utara pada tanggal 24 Desember 2019 telah dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi
1	521213	Honor Output Kegiatan	2.800.000,00
2	522141	Belanja Sewa	40.000.000,00
3	521211	Belanja Bahan	9.580.000,00
4	522191	Belanja Jasa Lainnya	30.000.000,00
5	524114	Belanja Perjadin Paket Meeting Dalam Kota	88.920.000,00
6	524111	Belanja Perjadin Biasa	28.700.000,00
JUMLAH			200.000.000,00

- Akan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup/fiktif) sebesar Rp136.450.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :
  - ❖ Pada kegiatan Belanja Sewa (MAK 522141) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran sewa gedung Laboratorium Komputer dan 100 komputer SMA Bina Satria Rupit dalam kegiatan Seleksi Panwascam Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 9 dan 12 Desember 2019 yang diterima oleh pihak sekolah ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
  - ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa anggaran sebesar Rp9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yaitu Belanja Keperluan Kantor (MAK 521111) sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) ternyata kegiatan tersebut adalah fiktif.
  - ❖ Belanja Jasa Lainnya (MAK 522191) sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran belanja publikasi kepada beberapa penyedia media online ternyata pembayaran tersebut fiktif/tidak ada.
  - ❖ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (MAK 524114) sebesar Rp88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran Uang Saku RDK

Halaman 9 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Uang Saku dan Transport Peserta Bimtek sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran Paket Rapat Fullboard Kegiatan Bimtek sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp64.570.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- ❖ Belanja Perjadin Biasa (MAK 524111) dengan total pengeluaran sebesar Rp28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani selaku Koordinator Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor: 01/Bawaslu Musi Rawas Utara/2020 hal Permohonan Pencairan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa tanggal 13 Januari 2020 terjadi perubahan bendahara pada Bawaslu Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 011/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBN di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Bupati Musi Rawas Utara bersama Saudara Munawir Bin Burhanudin menandatangani Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020. Dalam Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 terjadi pemindahan nomor rekening dan Bank penampung dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam

Halaman 10 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang semula berada di BRI KCU Palembang A. Rivai dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dipindahkan ke Bank Muamalat Cabang Palembang dengan Nomor Rekening 366-001-0797 atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara UTK 22HRBFFA.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus ribu rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Untuk penarikan dana dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Setelah melakukan penarikan dana tersebut kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melaporkan hal tersebut kepada Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudara Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhammad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri mendengar hal tersebut kemudian Saudara Munawir Bin Burhanudin mengatakan, "kita perlu dana pegangan untuk pengamanan dan penyemangat kerja". Kemudian di sahut oleh Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), "kita pegang masing-masing Rp.100 juta rupiah". Sehingga terjadilah kesepakatan tersebut untuk membagikan uang kepada Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhammad Ali Asek,

Halaman 11 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.

- Selanjutnya masih pada bulan Maret 2020 berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana diatas kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani menyerahkan/membagikan uang tersebut kepada :
  - Saudara Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang
  - Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang
  - Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
  - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
  - Saudara Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara
  - Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp160.663.900,- (seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 12 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor 90/Bawaslu-PROV.SS-07/VII/2020 hal Permohonan Pencairan Sisa Dana NPHD untuk Pengawasan Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara pada Bawaslu Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebesar Rp5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 untuk Pencairan Dana Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 sebesar Rp.5400.000.000,00. Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar Rp5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan

Halaman 13 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberhentikan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani dan mengangkat terdakwa sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah terdakwa dan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid yang mana uang tersebut kemudian dipegang oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk keperluan yang Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bayarkan sedangkan sisanya dipegang oleh terdakwa Kemudian Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid ada meminta lagi uang lebih kurang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran lainnya kepada terdakwa.
- Bahwa Sekira bulan Agustus bertempat di sebuah hotel yang berada di Palembang terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, keributan ini terkait saat itu terdakwa dipanggil oleh ketiga orang tersebut selaku komisioner di salah satu Hotel di Palembang, ketika itu Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard ikut mendampingi terdakwa, Lalu Saudara Munawir Bin Burhanudin dengan didampingi oleh Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri menyampaikan "mana uang sisa kegiatan?" dijawab terdakwa, "duit katek lagi" dijawab Saudara Munawir Bin Burhanudin lagi "ini duit kami, kalian cuma mengelolanyo bae" mendengar hal tersebut maka terdakwa mengeluarkan uang sisa kegiatan sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian dibagikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid kepada :

Halaman 14 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saudara Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2020 Terdakwa bersama-sama Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp516.000.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah terdakwa dan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid.
- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 terdakwa melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut dipegang serta dikelola oleh terdakwa dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah terdakwa dan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa bersama - sama Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat

Halaman 15 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dalam hal ini adalah terdakwa dan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dari pencairan ini terdapat sisa uang dan dibagikan oleh terdakwa kepada :

- Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid Sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saudara Akbar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Saudara Inayah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 081/SK/SS/SET/KP.00/X/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan tersebut memberhentikan terdakwa dan mengangkat Saudara Aceng Sudrajat, S.P., M.si. Bin Wawan Wiguna sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Bahwa pada masa Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.si. Bin Wawan Wiguna menjabat sebagai Koordinator Sekretariat, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna telah mencairkan dana hibah dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna yaitu sebagai berikut :
- Pencairan pada tanggal 03 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 16 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pada tanggal 04 Nopember 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Pencairan pada tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pencairan pada tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.75.950.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.323.580.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pencairan pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp.589.940.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Pencairan pada tanggal tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.305.472.500,- (tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pencairan pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggungjawaban dan bukti kuitansi serta Buku Kas Umum Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara, rincian penggunaan dana hibah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.328.332.400,00

Halaman 17 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



No	Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000,00
3	521211	Belanja Bahan	807.430.000,00
4	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	572.450.000,00
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000,00
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000,00
7	522141	Belanja Sewa	1.152.125.000,00
8	522151	Belanja Jasa Profesi	96.300.000,00
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	47.000.000,00
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000,00
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.241.125.000,00
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	391.580.000,00
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	2.182.560.000,00
14		Setor ke Kas Daerah	487.600,00
		Jumlah	9.000.000.000,00

- Akan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup/fiktif) sebesar Rp2.550.435.700,- (dua milyar lima ratus lima juta empat ratus tiga puluh lima tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Belanja Keperluan Kantor (MAK 521111) yaitu pengeluaran untuk konsumsi yang dibayarkan kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit sebesar Rp187.525.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ternyata pembayaran riil kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit hanya sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp187.295.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp269.160.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja ATK, Komputer Supply dan Fotokopi ternyata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran riil kepada Fotokopi Vitara dan Suci hanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp219.160.000,- (dua ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp164.050.000,- (seratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yaitu pengeluaran untuk pembayaran seragam batik dan pakaian dinas harian/lapangan (PDH/L) Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara kepada UD. Cemerlang ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak UD. Cemerlang adalah ongkos jahit baju PDH, PDL dan batik sebesar Rp36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp127.550.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp93.100.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja barang cetakan ternyata pembayaran riil kepada CV. Delima Jaya adalah sebesar Rp25.405.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp67.695.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Honor Output Kegiatan (MAK 521213), yaitu pembayaran Honorarium Pokja Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp214.350.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp32.350.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja sewa (MAK 522141) sebesar Rp649.275.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja sewa gedung/kantor dan peralatan kantor Gakkumdu dan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas Utara serta sewa meubelair dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Penyedia CV. Maha Prabu namun ternyata pembayaran tersebut fiktif/tidak ada sehingga terdapat anggaran

Halaman 19 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang difiktifkan sebesar Rp649.275.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- ❖ Belanja Jasa Profesi (MAK 522151) sebesar Rp96.300.000,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran untuk Honorarium Narasumber eksternal, internal dan moderator pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari hasil audit terdapat pengeluaran sebesar Rp65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak boleh dibayarkan kepada Narasumber karena berasal dari Internal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran honor kepada Narasumber pada kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan di Hotel Dewinda ternyata pengeluaran pembayaran honor sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah Fiktif karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal tersebut di Hotel Dewinda.
- ❖ Belanja Jasa Lainnya (MAK 522191) sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) namun ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- ❖ Perjalanan Dinas Biasa (MAK 524111) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp1.241.125.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport sebesar Rp31.625.700,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak dapat dibayarkan.
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (MAK 524113) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp391.580.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport yang tidak dapat sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (MAK 524114) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp2.182.560.000,- (dua milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Rp590.910.000,- Lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Rp229.075.000,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp1.116.985.000,- (satu milyar seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar yang membuat laporan pertanggung jawaban / Surat Pertanggung jawaban fiktif/mark up tersebut adalah terdakwa bersama - sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, dengan cara - cara sebagai berikut : bermula terdakwa, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid berkumpul pada saat berkumpul tersebut Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid mengatakan, *"tanda tanganlah SPJ ini, mano yang belum ado tandatangan atas nama kamu, SPJ ini sesuai dengan RAB"* maka Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan terdakwa menandatangani dokumen pertanggung jawaban yang difiktifkan/mark-up tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor

Halaman 21 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat., S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Kukuh Rekha Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya - tidaknya berjumlah Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode MAK	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Hasil Audit	Kerugian Keuangan Negara
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.332.832.400	2.141.037.400	191.795.000
2	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000	79.720.000	-
3	521211	Belanja Bahan	812.510.000	393.025.000	419.485.000
4	521213	Honor Output Kegiatan	575.250.000	542.900.000	32.350.000
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000	31.500.000	-
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000	18.900.000	-
7	522141	Belanja Sewa	1.192.125.000	513.850.000	678.275.000
8	522151	Belanja Narasumber	96.300.000	23.700.000	72.600.000
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	77.000.000	2.000.000	75.000.000
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000	50.490.000	-
11	524111	Belanja Perjalanan	1.269.825.000	1.234.899.300	34.925.700

Halaman 22 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Biasa	0	0	
12	524113	Supervisi/Pengawas an/Monev ke Desa/Kelurahan	391.580.0 00	390.680.0 00	900.000
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.271.480.00 0	1.089.925.00 0	1.181.555.000
Jumlah			9.199.512.400	6.512.626.70 0	2.686.885.700
PPN yang disetor ke Kas Negara					(55.719.921)
Pengembalian/Penyetoran ke Kas Negara					(116.365.700)
Nilai Kerugian Keuangan Negara					2.514.800.079,00

- Bahwa terkait dengan penggunaan dana hibah sebesar Rp.9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) dalam NPHD menyatakan bahwa batas akhir penyampaian laporan sampai dengan tanggal 7 April 2021 akan tetapi pada faktanya hingga berakhirnya tahun 2021 terdakwa bersama-sama dengan bersama - sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P., M.Si. Bin Wawan Wiguna tidak juga melaporkan pertanggungjawaban dana tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 : Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk huruf 18 menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 18 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan ayat (3) dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara ayat (6) pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 19 : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan Ayat (1) material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 19 : Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

Ayat (2)

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang - undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19 : Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat Ayat (3) (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan

Halaman 24 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan.

- d. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAB III, Pejabat Perbendaharaan Negara, Huruf C Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 182/NPHD/BKD/MRU/2019 Nomor 096/BawasluMusi Rawas Utara/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Pasal 2 : Hibah uang dari pihak kesatu kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 1 hanya dipergunakan oleh pihak kedua untuk membiayai pelaksanaan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Musi Rawas Utara tahun 2020.

Pasal 3 : Pihak kedua bertanggung jawab secara formal dan Ayat (4) material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 : Pihak kedua berkewajiban membuat laporan penggunaan Ayat (3) dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada pihak kesatu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna dan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta

Halaman 25 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril.

Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/ L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin selaku Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 tentang

Halaman 26 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bersama - sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/ L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*). Pada kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu antara tahun 2019 sampai 2021 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang berada di Jalan lintas Sumatera KM 3 Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.22/KMA/SKII/2011 tertanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* yakni telah membuat pertanggungjawaban fiktif/ mark up terhadap pengelolaan dana hibah yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

Halaman 27 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 Ayat (2) yang menyatakan Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi: a. Laporan penggunaan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang - undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAB III, Pejabat Perbendaharaan Negara, Huruf C Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA, Menerbitkan surat Penunjukkan penyedia Barang/Jasa, Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia Barang/Jasa, Melaksanakan kegiatan Swakelola, Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian / kontrak yang dilakukannya, Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak, Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, Membuat dan menandatangani SPP, Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA, Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan, Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang merugikan

Halaman 28 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp.9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) yang mana dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih adapun dasar pemberian hibah sebagaimana dimaksud adalah naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor : 096/Bawaslu-Muratarata/2019 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang di tandatangani oleh Bupati Musi Rawas Utara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Saudara Munawir Bin Burhanudin pada tanggal 1 Oktober 2019 dan addendum naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor : 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Halaman 29 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan Naskah perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan dana kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 3 tahap sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pada Tahun 2019, sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/770/SPM/BUD/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
  2. Pada Tahun 2020, sejumlah Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/004/SPM/BUD/2020 tanggal 25 Februari 2020.
  3. Pada Tahun 2020, Sejumlah Rp5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 900/233/SPM/BUD/2020 tanggal 9 Juli 2020.
- Bahwa pada periode Tirta Arisandi, S.Sos.,M.Si Bin Tabrani menjabat sebagai Koordinator Sekretariat / Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
  - ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : Saudara Munawir, S.S Bin Burhanudin (Alm), Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri.
  - ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Periode 21-11-2019 s.d 12-01-2020 adalah Saudari Indri Heryanti, SH setelah itu digantikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sampai dengan Desember 2020.
  - ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.
- Bahwa pada periode terdakwa menjabat sebagai Koordinator Sekretariat/ pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
  - ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : Saudara Munawir, S.S Bin Burhanudin (Alm), Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri.
  - ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid.

Halaman 30 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.
- Bahwa pada periode Aceng Sudrajat, S.P.,M.Si. Bin Wawan Wiguna menjabat sebagai Koordinator Sekretariat/ pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara struktur organisasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
  - ❖ Komisioner terdiri dari 3 (tiga) orang Yaitu : Saudara Munawir, S.S Bin Burhanudin (Alm), Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri.
  - ❖ Bendahara Pengeluaran Pembantu : Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid.
  - ❖ Staf Pengelola Keuangan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAB III, Pejabat Perbendaharaan Negara, Huruf C Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut
  - ❖ Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA.
  - ❖ Menerbitkan surat Penunjukkan penyedia Barang/Jasa.
  - ❖ Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia Barang/Jasa.
  - ❖ Melaksanakan kegiatan Swakelola.
  - ❖ Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya.
  - ❖ Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
  - ❖ Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
  - ❖ Membuat dan menandatangani SPP.
  - ❖ Melaporkan pelaksanaan/penyelsaian kegiatan kepada KPA.
  - ❖ Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan.

Halaman 31 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan
- ❖ Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 tentang Penunjukan / Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudara Tirta Arisandi, S.Sos, M.Si menggantikan Saudara Dahmuddin, S.IP, M.Si sebagai Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pileg Pilpres 2018/2019 selain itu Saudara Tirta Arisandi, S.Sos, M.Si juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 133/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 (Persiapan tahapan PILKADA 2020) sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kemudian sekira bulan Desember 2019 Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani bersama - sama dengan Saudari Indri Heryanti selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang juga merangkap sebagai Bendahara

Halaman 32 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI KCL Palembang A. Rivai atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5.

- Bahwa uang yang telah di ambil tersebut kemudian seluruhnya dipegang, dikuasai dan dikelola sendiri oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani seharusnya tugas untuk menyimpan dan membayarkan ada pada bendahara pengeluaran pembantu.
- Bahwa dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah disimpan serta dikelola oleh Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani berdasarkan laporan realisasi penggunaan anggaran NPHD pada Bawaslu Musi Rawas Utara TA 2019 melalui surat Nomor 167/Bawaslu-Prov.SS-07/TU-00.02/I/2020 kepada Bupati Musi Rawas Utara pada tanggal 24 Desember 2019 telah dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi
1	521213	Honor Output Kegiatan	2.800.000,00
2	522141	Belanja Sewa	40.000.000,00
3	521211	Belanja Bahan	9.580.000,00
4	522191	Belanja Jasa Lainnya	30.000.000,00
5	524114	Belanja Perjadin Paket Meeting Dalam Kota	88.920.000,00
6	524111	Belanja Perjadin Biasa	28.700.000,00
JUMLAH			200.000.000,00

- Akan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup/fiktif) sebesar Rp136.450.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :
  - ❖ Pada kegiatan Belanja Sewa (MAK 522141) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran sewa gedung Laboratorium Komputer dan 100 komputer SMA Bina Satria Rupit dalam kegiatan Seleksi Panwascam Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 9 dan 12 Desember 2019 yang diterima oleh pihak sekolah ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Halaman 33 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa anggaran sebesar Rp9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yaitu Belanja Keperluan Kantor (MAK 521111) sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) ternyata kegiatan tersebut adalah fiktif.
- ❖ Belanja Jasa Lainnya (MAK 522191) sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk pembayaran belanja publikasi kepada beberapa penyedia media online ternyata pembayaran tersebut fiktif/tidak ada.
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (MAK 524114) sebesar Rp.88.920.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran Uang Saku RDK sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Uang Saku dan Transport Peserta Bimtek sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran Paket Rapat Fullboard Kegiatan Bimtek sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp64.570.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Perjadin Biasa (MAK 524111) dengan total pengeluaran sebesar Rp.28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ternyata pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif sebesar Rp.25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani selaku Koordinator Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor: 01/Bawaslu Musi Rawas Utara/2020 hal Permohonan Pencairan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Halaman 34 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 13 Januari 2020 terjadi perubahan bendahara pada Bawaslu Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 011/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBN di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pada surat keputusan tersebut menetapkan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Bupati Musi Rawas Utara bersama Saudara Munawir Bin Burhanudin menandatangani Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020. Dalam Adendum NPHD Nomor 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 terjadi pemindahan nomor rekening dan Bank penampung dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang semula berada di BRI KCU Palembang A. Rivai dengan Nomor Rekening 0059-01-003821-30-5 atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dipindahkan ke Bank Muamalat Cabang Palembang dengan Nomor Rekening 366-001-0797 atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara UTK 22HRBFFA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus ribu rupiah). Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Untuk penarikan dana dari rekening bank

Halaman 35 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.

- Setelah melakukan penarikan dana tersebut kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melaporkan hal tersebut kepada Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri mendengar hal tersebut kemudian Saudara Munawir Bin Burhanudin mengatakan, "kita perlu dana pegangan untuk pengamanan dan penyemangat kerja". Kemudian di sahut oleh Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), "kita pegang masing-masing Rp100 juta rupiah". Sehingga terjadilah kesepakatan tersebut untuk membagikan uang kepada Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard.
- Selanjutnya masih pada bulan Maret 2020 berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana diatas kemudian Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani menyerahkan/membagikan uang tersebut kepada :
  - Saudara Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang
  - Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang.
  - Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
  - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bertempat di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Halaman 36 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Selanjutnya pada tanggal 03 April 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp160.663.900,- (seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama dengan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani melakukan penarikan dana hibah sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dibutuhkan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan Nomor 90/BAWASLU-PROV.SS-07/VII/2020 hal Permohonan Pencairan Sisa Dana NPHD untuk Pengawasan Pilkada Kabupaten Musi Rawas

Halaman 37 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada Bawaslu Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebesar Rp5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 untuk Pencairan Dana Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 sebesar Rp.5.400.000.000,00. Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 sebesar Rp5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan tersebut memberhentikan Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani dan mengangkat terdakwa sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa bersama - sama Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah terdakwa dan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid yang mana uang tersebut kemudian dipegang oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk keperluan yang Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bayarkan sedangkan sisanya dipegang oleh terdakwa Kemudian Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid ada meminta lagi uang lebih kurang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran lainnya kepada terdakwa.

Halaman 38 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira bulan Agustus bertempat di sebuah hotel yang berada di Palembang terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, keributan ini terkait saat itu terdakwa dipanggil oleh ketiga orang tersebut selaku komisioner di salah satu Hotel di Palembang, ketika itu Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard ikut mendampingi terdakwa, Lalu Saudara Munawir Bin Burhanudin dengan didampingi oleh Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) dan Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri menyampaikan *"mana uang sisa kegiatan?"* dijawab terdakwa, *"duit katek lagi"* dijawab Saudara Munawir Bin Burhanudin lagi *"ini duit kami, kalian cuma mengelolanyo bae"* mendengar hal tersebut maka terdakwa mengeluarkan uang sisa kegiatan sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian dibagikan oleh Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid kepada :
  - Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Saudara Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Saudara Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2020 Terdakwa bersama - sama Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp516.000.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening

Halaman 39 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah terdakwa dan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid.

- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 terdakwa melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut dipegang serta dikelola oleh terdakwa dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah terdakwa dan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa bersama - sama Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah terdakwa dan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dari pencairan ini terdapat sisa uang dan dibagikan oleh terdakwa kepada :
  - Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid Sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Saudara Kuku Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard Sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Saudara Akbar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Saudara Inayah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 terjadi perubahan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 081/SK/SS/SET/KP.00/X/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Keputusan

Halaman 40 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberhentikan terdakwa dan mengangkat Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Bahwa pada masa Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna menjabat sebagai Koordinator Sekretariat, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama-sama dengan Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna telah mencairkan dana hibah dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797 dengan menggunakan spesimen dari bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini adalah Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna yaitu sebagai berikut :

- Pencairan pada tanggal 03 Nopember 2020 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pencairan pada tanggal 04 Nopember 2020 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Pencairan pada tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pencairan pada tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp75.950.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp323.580.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pencairan pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pencairan pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp589.940.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pencairan pada tanggal tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 41 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp305.472.500,- (tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Pencairan pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pencairan pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen pertanggung jawaban dan bukti kuitansi serta Buku Kas Umum Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara, rincian penggunaan dana hibah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Kode MAK	Uraian	Realisasi (Rp)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.328.332.400,00
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000,00
3	521211	Belanja Bahan	807.430.000,00
4	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	572.450.000,00
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000,00
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000,00
7	522141	Belanja Sewa	1.152.125.000,00
8	522151	Belanja Jasa Profesi	96.300.000,00
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	47.000.000,00
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000,00
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.241.125.000,00
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	391.580.000,00
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	2.182.560.000,00
14		Setor ke Kas Daerah	487.600,00
		Jumlah	9.000.000.000,00

- Akan tetapi ternyata dalam pengelolaan dana sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak benar (markup/fiktif) sebesar Rp2.550.435.700,- (dua milyar lima ratus lima juta

Halaman 42 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh lima tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Belanja Keperluan Kantor (MAK 521111) yaitu pengeluaran untuk konsumsi yang dibayarkan kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit sebesar Rp.187.525.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ternyata pembayaran riil kepada Rumah Makan Erna Muara Rupit hanya sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp187.295.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp269.160.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja ATK, Komputer Supply dan Fotokopi ternyata pembayaran riil kepada Fotokopi Vitara dan Suci hanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp219.160.000,- (dua ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp164.050.000,- (seratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) yaitu pengeluaran untuk pembayaran seragam batik dan pakaian dinas harian/lapangan (PDH/L) Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara kepada UD. Cemerlang ternyata jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak UD. Cemerlang adalah ongkos jahit baju PDH, PDL dan batik sebesar Rp36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp127.550.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja Bahan (MAK 521211) sebesar Rp93.100.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja barang cetakan ternyata pembayaran riil kepada CV. Delima Jaya adalah sebesar Rp25.405.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga terdapat anggaran yang di fiktifkan sebesar Rp67.695.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 43 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Belanja Honor Output Kegiatan (MAK 521213), yaitu pembayaran Honorarium Pokja Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp214.350.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp32.350.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ❖ Belanja sewa (MAK 522141) sebesar Rp649.275.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran belanja sewa gedung/kantor dan peralatan kantor Gakkumdu dan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas Utara serta sewa meubelair dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Penyedia CV. Maha Prabu namun ternyata pembayaran tersebut fiktif/tidak ada sehingga terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp649.275.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Belanja Jasa Profesi (MAK 522151) sebesar Rp96.300.000,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran untuk Honorarium Narasumber eksternal, internal dan moderator pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari hasil audit terdapat pengeluaran sebesar Rp65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak boleh dibayarkan kepada Narasumber karena berasal dari Internal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu pembayaran honor kepada Narasumber pada kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilaksanakan di Hotel Dewinda ternyata pengeluaran pembayaran honor sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah Fiktif karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal tersebut di Hotel Dewinda.
- ❖ Belanja Jasa Lainnya (MAK 522191) sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) namun ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Halaman 44 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perjalanan Dinas Biasa (MAK 524111) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp1.241.125.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport sebesar Rp.31.625.700,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak dapat dibayarkan.
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (MAK 524113) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp391.580.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) terdapat pembayaran uang saku dan transport yang tidak dapat sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- ❖ Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (MAK 524114) dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp.2.182.560.000,- (dua milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ternyata terdapat anggaran yang difiktifkan sebesar Rp297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Rp590.910.000,- Lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Rp229.075.000,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp1.116.985.000,- (satu milyar seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar yang membuat laporan pertanggung jawaban / Surat Pertanggungjawaban fiktif / mark up tersebut adalah terdakwa bersama - sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, dengan cara - cara sebagai berikut : bermula terdakwa, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid berkumpul pada saat berkumpul tersebut Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid mengatakan, "tanda tanganlah SPJ ini, mano yang belum ado

Halaman 45 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan atas nama kamu, SPJ ini sesuai dengan RAB” maka Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid dan terdakwa menandatangani dokumen pertanggung jawaban yang difiktifkan/mark-up tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya-tidaknya berjumlah Rp.2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode MAK	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Hasil Audit	Kerugian Keuangan Negara
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.332.832.400	2.141.037.400	191.795.000
2	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	79.720.000	79.720.000	-
3	521211	Belanja Bahan	812.510.000	393.025.000	419.485.000

Halaman 46 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	521213	Honor Output Kegiatan	575.250.000	542.900.000	32.350.000
5	522111	Belanja Langganan Listrik	31.500.000	31.500.000	-
6	522113	Belanja Langganan Air	18.900.000	18.900.000	-
7	522141	Belanja Sewa	1.192.125.000	513.850.000	678.275.000
8	522151	Belanja Narasumber	96.300.000	23.700.000	72.600.000
9	522191	Belanja Jasa Lainnya	77.000.000	2.000.000	75.000.000
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.490.000	50.490.000	-
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.269.825.000	1.234.899.300	34.925.700
12	524113	Supervisi / Pengawasan / Monev ke Desa/Kelurahan	391.580.000	390.680.000	900.000
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.271.480.000	1.089.925.000	1.181.555.000
Jumlah			9.199.512.400	6.512.626.700	2.686.885.700
PPN yang disetor ke Kas Negara					(55.719.921)
Pengembalian/Penyetoran ke Kas Negara					(116.365.700)
Nilai Kerugian Keuangan Negara					2.514.800.079,00

- Bahwa terkait dengan penggunaan dana hibah sebesar Rp9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) dalam NPHD menyatakan bahwa batas akhir penyampaian laporan sampai dengan tanggal 7 April 2021 akan tetapi pada faktanya hingga berakhirnya tahun 2021 terdakwa bersama-sama dengan bersama - sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Pa, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Biulinan Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P., M.Si. Bin Wawan Wiguna tidak juga melaporkan pertanggung jawaban dana tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard adalah tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:
  - a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
    - Pasal 1 : Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk huruf 18 menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
    - Pasal 18 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan ayat (3) dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
    - Pasal 21 : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara ayat (6) pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    - Pasal 19 : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan Ayat (1) material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
    - Pasal 19 : Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
      - Ayat (2) d. Laporan penggunaan hibah;

Halaman 48 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

f. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

**Pasal 19** : Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat  
**Ayat (3)** (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAB III, Pejabat Perbendaharaan Negara, Huruf C Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 182/NPHD/BKD/MRU/2019 Nomor 096/BawasluMusi Rawas Utara/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

**Pasal 2** : Hibah uang dari pihak kesatu kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 1 hanya dipergunakan oleh pihak kedua untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020.

**Pasal 3** : Pihak kedua bertanggung jawab secara formal dan  
**Ayat (4)** material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5** : Pihak kedua berkewajiban membuat laporan penggunaan  
**Ayat (3)** dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan

Halaman 49 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada pihak kesatu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama -sama dengan Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna dan Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp2.514.800.079,- (dua milyar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang ditandatangani oleh Tim Audit Pembantu Penanggung Jawab : Agus Salim, Pengendali Teknis : Popy Rahmat Daulay, ketua tim : Muhamad Denny Murappal, Anggota Tim : Boyke Syafril.

Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saudara Munawir Bin Burhanudin, Saudari Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Saudara Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Saudari Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Saudara Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Saudara Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard serta Saudara Aceng Sudrajat, S.P., M.Si. Bin Wawan Wiguna (DPO Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Nomor: B-1619/ L.6.11/Fd.1/05/2022 tanggal 13 Mei 2022) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20

Halaman 50 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendrik, Sp., M.Si Bin Hadin, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrik, Sp., M.Si Bin Hadin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Hendrik, Sp., M.Si Bin Hadin membayar Uang pengganti sebesar Rp315.905.902,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp15.445.000,- tanggal 30 Maret 2020;
  2. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020;
  3. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.380.000,- tanggal 26 September 2020;

Halaman 51 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.410.000,- tanggal 26 September 2020;
5. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.260.000,- tanggal 31 Oktober 2020;
6. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020;
7. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp3.940.000,- tanggal 29 Desember 2020;
8. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp420.000,- tanggal 24 Desember 2020;
9. Copy 5 (lima) lembar outlet bill resto We Hotel dari Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
10. Copy Banquet Event Order nomor: 66/SM/02/2020 dengan total pembayaran Rp9.300.000,- oleh Bawaslu Kab Musi Rawas Utara untuk kegiatan tanggal 18-19 Februari 2020.
11. Copy SK Surat Perjanjian Kerja David Kasidi, S.T. sebagai Manager We Hotel No. 01/SK-1/Bulan VII/Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.
12. Copy Invoice No: 200/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 pemesanan Room We Hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp8.800.000;
13. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 pemesanan Room We Hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp10.250.000.;
14. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk pemesanan Meeting Room We Hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp3.960.000.;
15. Copy Invoice No: 202/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 untuk pemesanan Coffe break dan Lunch di We Hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp9.200.000.;
16. Asli Keputusan Kepala Kesekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggal 10 Juli 2020;
17. Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 tentang Penunjukan /

Halaman 52 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020;

18. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 tanggal 21 Oktober 2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 (Persiapan tahapan Pilkada 2020) sebesar Rp200.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
19. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 25 Februari 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 sebesar Rp3.600.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
20. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 sebesar Rp5.400.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
21. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara nomor: 026/KPTS/BKPSDM/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 28 Desember 2016.
22. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 029/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 31 Desember 2019.
23. Asli 1 (satu) bundel Surat kepada Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara terkait Permintaan Laporan SPJ Bawaslu Tahun Anggaran 2020.
24. Copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara TA 2020 dengan total anggaran sebesar Rp14.608.390.000,-

Halaman 53 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 194/KPTS/BKD/MRU/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2019 tanggal 18 Februari 2019.
26. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 266/KPTS/BPKAD/MRU/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 tanggal 3 Februari 2020.
27. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/NPHD/BKD/MRU/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019.
28. Copy 1 (satu) Bundel Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor : 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020.
29. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K.Bawaslu/KU.01.00/X/2019 Tentang Perubahan Kesembilan belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2019;
30. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.Bawaslu/Ku.01.00/I/2020 tentang Penunjukan kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 54 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : /SPTJM/SS-016/SET/KU.00.01/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
32. Copy 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Rekening atas nama Bawaslu Provinsi Sumsel (kode satker 115.01.2.686250 KD) Nomor:S-0186/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
33. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 0150/ST//2020 tanggal 24 Januari 2020;
34. Copy 1 (satu) bundel Laporan realisasi Penggunaan dana APBN 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
35. Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran sewa gedung Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saudara A. Nukman dari sistem aplikasi OM-SPAN;
36. Asli Buku catatan Pribadi Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara.
37. Copy Rincian belanja pencairan pertama Koordinator Kesekretariatan atas nama Tirta Arisandi sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
38. Asli (1) satu bundel nota dari toko Fotokopi Vitara;
39. Asli (4) empat lembar nota belanja dari toko percetakan Delima Jaya;
40. Asli (5) lembar nota belanja dari Rumah Makan Erna Ayub.
41. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 123.16/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
42. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
43. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
44. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan April 2020.
45. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juni 2020.
46. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 2020.

Halaman 55 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Agustus 2020.
48. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan September 2020.
49. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
50. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
51. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
52. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
53. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Desember 2020.
54. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Januari 2021.
55. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Februari 2021.
56. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai Bulan Desember 2019 s/d Bulan Maret 2021.
57. Asli 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
58. Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran Bulan Januari 2020 s/d April 2021.
59. Asli 1 (satu) bundel LPJ Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Desember 2019 s/d Maret 2021.
60. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas Hibah Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) bundel Register Pemeriksaan Kas Hibah.
62. Asli 1 (satu) buah Buku Block Note Catatan Pengeluaran Bendahara Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
63. Copy 1 (satu) bundel invoice Dewinda hotel, yang terdiri dari :
  - a. Nomor: CH/20/00936 tanggal 28-30 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;

Halaman 56 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor: CH/20/00935 tanggal 11-13 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- c. Nomor: CH/20/00934 tanggal 1-3 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- d. Nomor: CH/20/00933 tanggal 27-28 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- e. Nomor: CH/20/00641 tanggal 13-15 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- f. Nomor: CH/20/00640 tanggal 10-12 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- g. Nomor: CH/20/00639 tanggal 28-30 Juli 2020 sebesar 77.220.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- h. Nomor: CH/20/00638 tanggal 25-27 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- i. Nomor: CH/20/00981 tanggal 19-21 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- j. Nomor: CH/20/00979 tanggal 2-4 Juni 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara
- k. Nomor: CH/20/00977 tanggal 1-3 April 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- l. Nomor: CH/20/00551 tanggal 12-14 Maret 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
- 64. Asli 1 (satu) buah nota kosong toko jahit UD. Cemerlang beserta cap dan tandatangan.
- 65. 1 (Satu) Unit laptop merk Asus Vivo Book A442UR-GA043T berwarna merah beserta Charger berwarna hitam.
- 66. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004.17/SK/SS/SET/KU.00/II/2019 tentang Penunjukan/Penetapan staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019.
- 67. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0627/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten / Kota Se-

Halaman 57 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.

68. Copy 1(satu) lembar Bukti transfer kepada Munawir sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui bank BCA tanggal 25 Maret 2020.
69. Copy 4 (empat) lembar tanda terima bantuan operasional tanggal 25 maret 2020, 13 Desember 2019, 8 Maret 2020 dan Maret 2020.
70. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor: 45/BA/Bawaslu.Prov.SS-06/KP.07.00/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
71. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 133/SK/SS//SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
72. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 tentang penunjukan / Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rangka Pileg Pilpres tahun 2018/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
73. Asli 3 (tiga) lembar Surat Tugas Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 800/077/BKPSDM/MRU/2020 tanggal 17 Februari 2020.
74. Copy 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:022.14/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Pengangkatan / Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 tanggal 01 Februari 2020.
75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 002/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Zahro HA Wahid, SE., MM. Diperbantukan

Halaman 58 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 11 November 2019.
76. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 7 Januari 2020.
  77. Copy 1 (satu) lembar Pakta Integritas Penerima Dana Hibah Kab. Muratara tanggal 7 Januari 2020.
  78. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal tanggal 7 Januari 2020.
  79. Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Uang tanggal 7 Januari 2020.
  80. Asli 2 (dua) lembar Buku Kas Umum APBD Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.
  81. Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019.
  82. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 atas dana hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  83. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 196/SK/SS/SET/KP.00/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 053/SK/SS/SET/KP.00/II/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 21 Nopember 2019.
  84. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0027/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.
  85. Uang sebesar Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
- Terhadap barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aceng Sudrajat, S.P., M. Si Bin Wawan Wiguna.

Halaman 59 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama – sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum pula Terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp281.905.902,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus dua rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 60 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp15.445.000,- tanggal 30 maret 2020;
2. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020;
3. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.380.000,- tanggal 26 September 2020;
4. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.410.000,- tanggal 26 September 2020;
5. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.260.000,- tanggal 31 Oktober 2020;
6. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020;
7. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp3.940.000,- tanggal 29 Desember 2020;
8. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp420.000,- tanggal 24 Desember 2020;
9. Copy 5 (lima) lembar outlet bill resto We Hotel dari Bawaslu kabupaten Musi Rawas Utara;
10. Copy Banquet Event Order nomor: 66/SM/02/2020 dengan total pembayaran Rp9.300.000,- oleh bawaslu Kab Musi Rawas Utara untuk kegiatan tanggal 18-19 Februari 2020.;
11. Copy SK Surat Perjanjian Kerja David Kasidi, S.T. sebagai Manager We Hotel No. 01/SK-1/Bulan VII/Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.
12. Copy Invoice No: 200/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 pemesanan Room We Hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp8.800.000;
13. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 pemesanan Room We Hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp10.250.000.;
14. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk pemesanan Meeting Room We Hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp3.960.000.;
15. Copy Invoice No: 202/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 untuk pemesanan Coffe break dan Lunch di we hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp9.200.000.I

Halaman 61 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Keputusan Kepala Kesekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggal 10 Juli 2020;
17. Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020;
18. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 tanggal 21 Oktober 2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 (Persiapan tahapan Pilkada 2020) sebesar Rp200.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
19. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 25 Februari 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp3.600.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
20. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 Sebesar Rp5.400.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
21. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara nomor: 026/KPTS/BKPSDM/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 28 Desember 2016.
22. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 029/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi

Halaman 62 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 31 Desember 2019.
23. Asli 1 (satu) bundel Surat kepada Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara terkait Permintaan Laporan SPJ Bawaslu Tahun Anggaran 2020.
  24. Copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara TA 2020 dengan total anggaran sebesar Rp14.608.390.000,-
  25. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 194/KPTS/BKD/MRU/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2019 tanggal 18 Februari 2019.
  26. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 266/KPTS/BPKAD/MRU/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 tanggal 3 Februari 2020.
  27. Copy 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/NPHD/BKD/MRU/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019.
  28. Copy 1 (satu) Bundel Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor : 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020.
  29. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K.Bawaslu/KU.01.00/X/2019 tentang Perubahan Kesembilan Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 63 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.Bawaslu/Ku.01.00/I/2020 tentang Penunjukan kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 2 Januari 2020;
31. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : /SPTJM/SS-016/SET/KU.00.01/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
32. Copy 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Bawaslu Provinsi Sumsel (kode satker 115.01.2.686250 KD) Nomor : S-0186/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
33. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 0150/ST/I/2020 tanggal 24 Januari 2020;
34. Copy 1 (satu) bundel Laporan realisasi Penggunaan dana APBN 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
35. Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran sewa gedung Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah ) kepada saudara A.Nukman dari sistem aplikasi OM-SPAN;
36. Asli Buku catatan Pribadi Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara.
37. Copy rincian belanja pencairan pertama Koordinator Kesekretariatan atas nama Tirta Arisandi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
38. Asli (1) satu bundel nota dari toko Fotokopi Vitara;
39. Asli (4) empat lembar nota belanja dari toko percetakan Delima Jaya;
40. Asli (5) lembar nota belanja dari Rumah Makan Erna Ayub.
41. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 123.16/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
42. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
43. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.

Halaman 64 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan April 2020.
45. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juni 2020.
46. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 2020.
47. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Agustus 2020.
48. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan September 2020.
49. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
50. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
51. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
52. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
53. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Desember 2020.
54. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Januari 2021.
55. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Februari 2021.
56. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai Bulan Desember 2019 s/d Bulan Maret 2021.
57. Asli 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
58. Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran Bulan Januari 2020 s/d April 2021.
59. Asli 1 (satu) bundel LPJ Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Desember 2019 s/d Maret 2021.
60. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas Hibah Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) bundel Register Pemeriksaan Kas Hibah.

Halaman 65 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Asli 1 (satu) buah Buku Block Note Catatan Pengeluaran Bendahara Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
63. Copy 1 (satu) bundel invoice Dewinda Hotel, yang terdiri dari :
  - a. Nomor: CH/20/00936 tanggal 28-30 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  - b. Nomor: CH/20/00935 tanggal 11-13 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  - c. Nomor: CH/20/00934 tanggal 1-3 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  - d. Nomor: CH/20/00933 tanggal 27-28 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  - e. Nomor: CH/20/00641 tanggal 13-15 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  - f. Nomor: CH/20/00640 tanggal 10-12 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  - g. Nomor: CH/20/00639 tanggal 28-30 Juli 2020 sebesar 77.220.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  - h. Nomor: CH/20/00638 tanggal 25-27 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  - i. Nomor: CH/20/00981 tanggal 19-21 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  - j. Nomor: CH/20/00979 tanggal 2-4 Juni 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  - k. Nomor: CH/20/00977 tanggal 1-3 April 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  - l. Nomor: CH/20/00551 tanggal 12-14 Maret 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
64. Asli 1 (satu) buah nota kosong toko jahit UD. Cemerlang beserta cap dan tandatangan.
65. 1 (satu) Unit laptop merk Asus Vivo Book A442UR-GA043T berwarna merah beserta Charger berwarna hitam.
66. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004.17/SK/SS/SET/KU.00/II/2019 Tentang Penunjukan / Penetapan staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas

Halaman 66 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019.

67. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0627/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.
68. Copy 1(satu) lembar Bukti transfer kepada Munawir sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui bank BCA tanggal 25 Maret 2020.
69. Copy 4 (empat) lembar Tanda terima bantuan operasional tanggal 25 maret 2020, 13 Desember 2019, 8 Maret 2020 dan Maret 2020.
70. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor: 45/BA/Bawaslu.Prov.SS-06/KP.07.00/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
71. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:133/SK/SS//SET/KP.00/X/2019 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
72. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 Tentang penunjukan / Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rangka Pileg Pilpres tahun 2018/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
73. Asli 3 (tiga) lembar Surat Tugas Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 800/077/BKPSDM/MRU/2020 tanggal 17 Februari 2020.
74. Copy 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:022.14/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Pengangkatan / Penetapan Pegawai Pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) pada

Halaman 67 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 tanggal 01 Februari 2020.

75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 002/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Zahro HA Wahid, SE.MM. Diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 11 November 2019.
76. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 7 Januari 2020.
77. Copy 1 (satu) lembar Pakta Integritas Penerima Dana Hibah Kab. Muratara tanggal 7 Januari 2020.
78. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal tanggal 7 Januari 2020.
79. Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Uang tanggal 7 Januari 2020.
80. Asli 2 (dua) lembar Buku Kas Umum APBD Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.
81. Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019.
82. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 atas dana hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
83. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:196/SK/SS/SET/KP.00/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor:053/SK/SS/SET/KP.00/II/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 21 Nopember 2019.
84. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0027/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Halaman 68 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten / Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 84 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aceng Sudrajat, S.P., M.Si Bin Wawan Wiguna;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 08 November 2022 Nomor : 41/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2022 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 09 November 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 November 2022 Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, serta relaas pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang pada tanggal 09 November 2022;

Menimbang, bahwa Akta memori banding Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Nopember 2022 Nomor : 41/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, memori banding mana telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 06 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Banding Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2022 PN Plg pada tanggal 02 November 2022 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 21 November 2022 dan tanggal 09 November 2022;

Halaman 69 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 18 Nopember 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang adalah Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendrik,SP., M.Si Bin Hadin belum memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menurut kami Penuntut Umum, pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim berdasarkan putusan a quo yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPPidana tidak sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diperoleh di depan persidangan. Hal tersebut kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 70 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64  
Ayat (1) KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)  
dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia  
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  
ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia  
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55  
ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1)  
KUHPidana;

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara  
Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang dalam  
memberikan putusan terhadap perakra *A quo* harus terlebih dahulu  
mempertimbangkan Dakwaan Primair Penutut umum yaitu melanggar  
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)  
Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang  
Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP  
Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur - unsurnya sebagai  
berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain  
atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut  
serta melakukan;
6. Unsur sebagai perbuatan berlanjut;
  - Bahwa terhadap pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur  
Pasal sebgai berikut :
    1. Setiap orang;
    2. Secara melawan Hukum;



3. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara;
4. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;
5. Unsur sebagai perbuatan berlanjut;

Pada pokoknya kami sependapat dengan *Judex Factie* terkait pertimbangan analisis yuridis dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, selama tidak bertentangan dengan tuntutan kami penuntut umum.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut umum tidak sependapat tentang tindak Pidana yang dapat dibuktikan putusan *Judex Factie* sebagaimana diuraikan dalam Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg Tanggal 02 November 2022 adalah dakwaan Subsidaire Penuntut umum dan Penuntut umum berpendapat dakwaan yang terbukti Dakwaan Primar Penuntut Umum, dalam pertimbangan *Judex Factie* dalam halaman 204 sampai dengan halaman 205 *Judex factie* telah keliru dalam menerapkan pembuktian tentang unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan pokok-pokok pertimbangan *Judex Factie* sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan bukti dan dibenarkan dengan keterangan terdakwa maka tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin telah menjadikan Terdakwa atau orang lain atau Korporasi atau yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;
- Menimbang, bahwa pada masa jabatan Terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin selaku Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pengelolaan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 dan 2020, Terdakwa tidak ada membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada masa kegiatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli R. Wiyono yang menjelaskan "bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank yang tentunya dengan syarat harus melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) tersebut (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 40).
- Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati menambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku dan orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta-harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Vide : Darmawan Prinst, SH.op.cit. hlm. 31).
- Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan memperkaya dan untuk menjawabnya baiknya dilakukan dengan penafsiran yang sudah barang tentu dibenarkan, salah satunya yaitu penafsiran secara gramatikal (tata bahasa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka tahun 2003 dijelaskan bahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan lebih kaya dan kaya sendiri memiliki pengertian banyak hartanya berupa uang dan sebagainya.

Halaman 73 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *"Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindra Persada, 2006 halaman 185" menguraikan "... ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsure ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak;"  
Selanjutnya oleh Andi Hamzah, mengurai pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut : "menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relative, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian tetap relative walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/ tidak kaya".  
Selanjutnya Andi Hamzah dalam bukunya pada halaman 184 mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kaya "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya."
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.  
F. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai kerugian keuangan Negara.



Penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan Negara di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan Negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan Negara di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK.
  2. Nilai kerugian keuangan Negara sampai dengan dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 PTPK.
- Bahwa *Judec Factie* dalam pertimbangannya dalam halaman 204 Paragraf 2 menjelaskan sebagai berikut : Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu



korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3);

- Penuntut Umum berpendapat sifat perbuatan Terdakwa dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sangat tergambar pada persidangan berdasarkan Fakta Perbuatan Terdakwa dihubungkan Alat bukti Saksi-saksi dan Alat bukti Surat Alat Bukti, Keterangan Ahli, Petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga menjadikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan yaitu sebagai berikut :
- *Judec Factie* dalam pertimbangannya pada halaman 186 Paragraf 1 sampai dengan Halaman 185 Paragraf 1 menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin bersama - sama dengan Munawir Bin Burhanudin, Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Aceng Sudrajat.,S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna, Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan serta mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 adalah masing – masing sebagai berikut :
- 1) Terdakwa Hendrik, Sp., Msi Bin Hadin, selaku Koordinator Sekretariat sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Munawir Bin Burhanudin, selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu :
  - a. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan melakukan *mark up* pengeluaran / belanja dengan cara merekayasa bukti pengeluaran / belanja, b. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 3) Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu :
  - a. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan melakukan *mark up* pengeluaran / belanja dengan cara merekayasa bukti pengeluaran / belanja, b. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 4) Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu :
  - a. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan melakukan *mark up* pengeluaran / belanja dengan cara merekayasa bukti pengeluaran / belanja, b. bersama – sama Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengelola Keuangan memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;

Halaman 77 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, selaku Koordinator Sekretariat sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 6) Aceng Sudrajat, S.p., M.si. Bin Wawan Wiguna, selaku Koordinator Sekretariat sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 7) Siti Zahro, S.E Binti Wahid, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator Sekretaris dan Pengelola Keuangan melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja;
- 8) Kuku Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard, selaku Staff Pengelola Keuangan pada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perbuatan yaitu : a. bersama – sama Koordinator Sekretaris dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pengeluaran fiktif dengan cara





memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar, b. memperoleh atau menerima dana / uang tidak sesuai ketentuan yang berasal dari hasil pengeluaran fiktif maupun *mark up* atas pertanggung jawaban pengeluaran / belanja; Bahwa atas perbuatan Terdakwa Aceng Sudrajat., S.p.,M.si. Bin Wawan Wiguna bersama - sama dengan Munawir Bin Burhanudin, Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin, Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri , Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Kuku Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benharddan telah menimbulkan kerugian negara yang mana hasil dari tindak pidana tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa Sendiri maupun orang lain, dalam bentuk uang yang merupakan uang adalah bagian dari harta kekayaan sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian dan penjelasan harta kekayaan diatas, bahwa *Judec Factie* dalam pertimbangannya pada halaman 183 Paragraf 3 sampai dengan Halaman 184, menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada masa Koordinator Sekretaris Tirta Arisandi, S.Sos.,M.Si Bin Tabrani adalah di bulan Maret 2020 dengan alasan karena kegiatan telah dilaksanakan dibagikan dan mengalir ke masing – masing pihak – pihak tertentu antara lain:
  - a. Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang;
  - b. Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang;
  - c. Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp115.000.00000 (seratus lima belas juta rupiah) bertempat di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di Bawaslu KABupaten Musi Rawas Utara;
- e. Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- f. Tirta Arisandi Bin H. Tabrani sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- g. Zairida sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h. Adi Winata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- i. Sopir Junaidi Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Samsul Alwi selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. Iin Irwanto selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- l. Yenli Elmanoferi selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- m. Iwan Ardiansyah selaku Komisioner Bawaslu Provinsi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- n. Zulpani Ahyadi selaku (BPKAD) Musi Rawas Utara sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- o. 20 Staff Bawaslu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- p. Rahmat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada masa Koordinator Sekretaris Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin adalah di bulan Agustus 2020, bertempat di sebuah hotel di Palembang mengalir uang sisa kegiatan sebesar

Halaman 80 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan dibagikan kepada ke pihak – pihak tertentu antara lain:

- a. Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - c. Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - d. Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - e. Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - f. Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2020 Siti Zahro, S.E Binti Wahid bersama - sama Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin melakukan pencairan dana hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari rekening bank Muamalat Cabang Utama Palembang atas nama RPL 014 PDHL Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor Rekening 366-001-0797. Dari sisa pencairan uang dan selanjutnya oleh Siti Zahro, S.E Binti Wahid dibagikan kepada :
- a. Hendrik.Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Kukuh Rekza Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada masa Koordinator Sekretaris Tirta Arisandi, S.Sos., M.Si Bin Tabrani adalah di bulan Maret 2020

Halaman 81 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena kegiatan telah dilaksanakan dibagikan dan mengalir ke masing – masing pihak – pihak tertentu antara lain:

- a) Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang;
- b) Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) bertempat di Hotel Emilia Palembang;
- c) Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp115.000.00000 (seratus lima belas juta rupiah) bertempat di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- d) Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e) Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- f) Tirta Arisandi Bin H. Tabrani sebesar Rp115.000.00000 (seratus lima belas juta rupiah);
- g) Zairida sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h) Adi Winata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- i) Sopir Junaidi Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- j) Samsul Alwi selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k) Iin Irwanto selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- l) Yenli Elmanoferi selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 82 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Iwan Ardiansyah selaku Komisioner Bawaslu Provinsi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- n) Zulpani Ahyadi selaku (BPKAD) Musi Rawas Utara sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- o) 20 Staff Bawaslu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- p) Rahmat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada masa Koordinator Sekretaris Terdakwa Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin adalah di bulan Agustus 2020, bertempat di sebuah hotel di Palembang mengalir uang sisa kegiatan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan dibagikan kepada ke pihak – pihak tertentu antara lain:
  - a) Munawir Bin Burhanudin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b) Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - c) Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - d) Terdakwa Hendrik, Sp.,Msi Bin Hadin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - e) Siti Zahro, S.E Binti Wahid sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - f) Kukuh Reksa Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum : perbuatan Terdakwa Hendrik, SP.,M.Si Bin Hadin yang melakukan pengeluaran fiktif dengan cara memalsukan atau membuat bukti yang tidak benar dan menerima uang total sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bersama para pihak lain merupakan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah

Halaman 83 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang di *mark up* / kegiatan difiktifkan serta tidak sesuai dengan peruntukannya, adalah dalam kapasitasnya menyalah gunakan jabatan atau kewenangan, kesempatan, atau sarana Terdakwa selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara periode sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas telah tergambar jelas Terdakwa dan orang lain telah menikmati uang hasil tindak pidana tersebut yang mana terhadap uang tersebut merupakan penambahan harta kekayaan yang sudah diketahui bersama sehingga seharusnya *Judec Factie* dalam pertimbangannya terkait penjelasan mengenai unsur Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi pada Halaman 204 memasukkan fakta-fakta hukum diatas, dan menyatakan terhadap unsur Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Menurut kami Penuntut Umum, Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;; berdasarkan Putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.
- Bahwa, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai putusan *judex Factie* sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 02 November 2022 kepada terdakwa Hendrik,SP., M.Si Bin Hadin, dan Lamanya hukuman yang dijatuhkan atas Terdakwa Hendrik,SP.,M.Si Bin Hadin yang dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi keadilan

Halaman 84 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, terlebih tindak pidana Korupsi merupakan Extra Ordinary Crime, dan perbuatan Dari Mens Rea perbuatan Terdakwa Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri bersama - sama dengan Munawir Bin Burhanudin, Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm), Tirta Arisandi Bin H. Tabrani, Aceng Sudrajan bin Wawan Wiguna, Muhamad Ali Asek, S.Pd.I Bin Hasan Basri, Siti Zahro, S.E Binti Wahid, Kukuh Rekso Prabu S.Pd Bin Basuki Benhard dan telah menimbulkan kerugian negara yang mana hasil dari tindak pidana tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa Sendiri maupun orang lain serta telah tergambar dengan jelas dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

- Bahwa *judex factie* dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman terhadap terdakwa sungguh tidak menggambarkan suatu upaya dalam mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dan keinginan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah membawa penderitaan secara mendalam bagi bangsa ini serta telah menjangkit semua kalangan dan golongan masyarakat, sebagaimana yang kita fahami bahwa meskipun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa haruslah bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta lebih jauh lagi untuk mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan; Menghukum Terdakwa Hendrik, Sp., M.Si Bin Hadin membayar Uang pengganti sebesar Rp315.905.902,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp15.445.000,- tanggal 30 Maret 2020;
  2. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020;
  3. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.380.000,- tanggal 26 September 2020;
  4. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.410.000,- tanggal 26 September 2020;
  5. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.260.000,- tanggal 31 Oktober 2020;
  6. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.550.000,- tanggal 29 Agustus 2020;

Halaman 86 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp3.940.000,- tanggal 29 Desember 2020;
8. Copy 1 buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp420.000,- tanggal 24 Desember 2020;
9. Copy 5 (lima) lembar outlet bill resto We Hotel dari Bawaslu kabupaten Musi Rawas Utara;
10. Copy Banquet Event Order nomor: 66/SM/02/2020 dengan total pembayaran Rp9.300.000,- oleh bawaslu Kab Musi Rawas Utara untuk kegiatan tanggal 18-19 Februari 2020.
11. Copy SK Surat Perjanjian Kerja David Kasidi, S.T. sebagai Manager We Hotel No. 01/SK-1/Bulan VII/Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.
12. Copy Invoice No: 200/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 pemesanan room we hotel atas nama BAWASLU Musi Rawas Utara sebesar Rp 8.800.000,-;
13. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 pemesanan room we hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp10.250.000;
14. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk pemesanan Meeting room we hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp3.960.000;
15. Copy Invoice No: 202/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 untuk pemesanan Coffe break dan Lunch di we hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp9.200.000;
16. Asli Keputusan Kepala Kesekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggal 10 Juli 2020.

Halaman 87 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020.
18. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 tanggal 21 Oktober 2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 (Persiapan tahapan Pilkada 2020) Sebesar Rp200.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
19. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 25 Februari 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 Sebesar Rp3.600.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
20. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kab. Musi Rawas Utara Nomor: 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 Sebesar Rp5.400.000.000,- beserta lampiran kelengkapannya.
21. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara nomor: 026/KPTS/BKPSDM/2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah kabupaten musu Rawas Utara tanggal 28 Desember 2016.
22. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 029/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 31 Desember 2019.

Halaman 88 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli 1 (satu) bundel Surat kepada Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara terkait Permintaan Laporan SPJ Bawaslu Tahun Anggaran 2020.
24. Copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara TA 2020 dengan total anggaran sebesar Rp14.608.390.000,-
25. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 194/KPTS/BKD/MRU/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2019 tanggal 18 Februari 2019.
26. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 266/KPTS/BPKAD/MRU/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 tanggal 3 Februari 2020.
27. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/ NPHD/ BKD/ MRU/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2019.
28. Copy 1 (satu) Bundel Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor : 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020.
29. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K.Bawaslu/KU.01.00/X/2019 Tentang Perubahan Kesembilan belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 89 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.Bawaslu/Ku.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 2 Januari 2020;
31. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : /SPTJM/SS-016/SET/KU.00.01/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
32. Copy 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Bawaslu Provinsi Sumsel (kode satker 115.01.2.686250 KD) Nomor:S-0186/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
33. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 0150/ST/I/2020 tanggal 24 Januari 2020;
34. Copy 1 (satu) bundel Laporan realisasi Penggunaan dana APBN 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
35. Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran sewa gedung Bawaslu Kab. Musi Rawas Utara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah ) kepada saudara A. Nukman dari sistem aplikasi OM-SPAN;
36. Asli Buku catatan Pribadi Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara;
37. Copy Rincian belanja pencairan pertama Koordinator Kesekretariatan atas nama Tirta Arisandi sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
38. Asli (1) satu bundel nota dari toko Fotokopi Vitara
39. Asli (4) empat lembar nota belanja dari toko percetakan Delima Jaya;
40. Asli (5) lembar nota belanja dari Rumah Makan Erna Ayub.
41. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 123.16/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan/Penetapan

Halaman 90 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

42. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
43. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Maret 2020.
44. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan April 2020.
45. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juni 2020.
46. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Juli 2020.
47. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Agustus 2020.
48. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan September 2020.
49. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
50. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan November 2020.
51. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
52. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Oktober 2020.
53. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Desember 2020.
54. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Januari 2021.
55. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bulan Februari 2021.
56. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai Bulan Desember 2019 s/d Bulan Maret 2021.

Halaman 91 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Asli 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
58. Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran Bulan Januari 2020 s/d April 2021.
59. Asli 1 (satu) bundel LPJ Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Desember 2019 s/d Maret 2021.
60. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas Hibah Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) bundel Register Pemeriksaan Kas Hibah.
62. Asli 1 (satu) buah Buku Block Note Catatan Pengeluaran Bendahara Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
63. Copy 1 (satu) bundel invoice Dewinda hotel, yang terdiri dari:
  1. Nomor: CH/20/00936 tanggal 28-30 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  2. Nomor: CH/20/00935 tanggal 11-13 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  3. Nomor: CH/20/00934 tanggal 1-3 September 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  4. Nomor: CH/20/00933 tanggal 27-28 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  5. Nomor: CH/20/00641 tanggal 13-15 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  6. Nomor: CH/20/00640 tanggal 10-12 Agustus 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  7. Nomor: CH/20/00639 tanggal 28-30 Juli 2020 sebesar 77.220.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
  8. Nomor: CH/20/00638 tanggal 25-27 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;

Halaman 92 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nomor: CH/20/00981 tanggal 19-21 Juli 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
10. Nomor: CH/20/00979 tanggal 2-4 Juni 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
11. Nomor: CH/20/00977 tanggal 1-3 April 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
12. Nomor: CH/20/00551 tanggal 12-14 Maret 2020 sebesar 49.500.000,- oleh Bawaslu Musi Rawas Utara.
64. Asli 1 (satu) buah nota kosong toko jahit UD. Cemerlang beserta cap dan tandatangan.
65. 1 (Satu) Unit laptop merk Asus Vivo Book A442UR-GA043T berwarna merah beserta Charger berwarna hitam.
66. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004.17/SK/SS/SET/KU.00/II/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019.
67. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0627/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.
68. Copy 1(satu) lembar Bukti transfer kepada Munawir sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui bank BCA tanggal 25 Maret 2020
69. Copy 4 (empat) lembar Tanda terima bantuan operasional tanggal 25 maret 2020, 13 Desember 2019, 8 Maret 2020 dan Maret 2020.
70. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor: 45/BA/Bawaslu.PROV.SS-06/KP.07.00/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.

Halaman 93 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:133/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019.
72. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 Tentang penunjukan/Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rangka Pileg Pilpres tahun 2018/2019 tanggal 8 Oktober 2019.
73. Asli 3 (tiga) lembar Surat Tugas Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 800/077/BKPSDM/MRU/2020 tanggal 17 Februari 2020.
74. Copy 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:022.14/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Pengangkatan / Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 tanggal 01 Februari 2020.
75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 002/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Zahro HA Wahid, SE., MM. Diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 11 November 2019.
76. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 7 Januari 2020.
77. Copy 1 (satu) lembar Pakta Integritas Penerima Dana Hibah Kab. Murata tanggal 7 Januari 2020.
78. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal tanggal 7 Januari 2020.

Halaman 94 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Uang tanggal 7 Januari 2020.
80. Asli 2 (dua) lembar Buku Kas Umum APBD Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019.
81. Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019.
82. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 atas dana hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
83. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:196/SK/SS/SET/KP.00/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor:053/SK/SS/SET/KP.00/I/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 21 Nopember 2019.
84. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0027/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-P
85. rovinsi Sumatera Selatan masa jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018.
86. Uang tunai sebesar Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).  
Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Paulina, S.Si Binti Samsul Bahri (Alm).
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 95 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 06 Desember 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini telah benar dan dapat menerapkan hukum yang berlaku tetapi dengan lama hukuman kami Penasihat Hukum kurang sependapat dengan lamanya hukuman yang diterapkan.
2. Bahwa Judex factie telah benar dalam menerapkan hukum berdasarkan fakta hukum dan fakta kejadian sebenarnya.

Bahwa Perbuatan Terbanding bukanlah tindak pidana melainkan hanya melaksanakan tugas bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang mana terdakwa Tepaksa untuk mengeluarkan kegiatan untuk SPPD (surat perintah perjalanan dinas) ada beberapa kegiatan yang tidak termasuk dalam RAB Penggunaan anggaran dana hibah tetapi Ketua Panwaslu yaitu saksi Munawir dan 2 (dua) anggotanya saksi Ali Asek dan Saksi Paulina tidak mau tau karena harus diganti uang mereka yang sudah mereka keluarkan dan harus diganti oleh terdakwa melalui dana hibah Panwaslu karena menuruti perintah dari atasnya saja.

3. Bahwa apa yang dituliskan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada memori banding pada tanggal 18 November 2022 pada halaman 19 yang berbunyi : bahwa benar pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukan pada masa Koordinator Sekertaris Hendrik, SP., Msi Bin Hadin di bulan Agustus 2022 bertempat mengalir uang sisa uang kegiatan sebesar Rp90.000.00,- (sembilan puluh juta rupiah) dan di bagi-bagi kepada pihak tertentu antara lain : 1. Munawir sebesar = 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 2. Paulina sebesar = 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) 3. Muhamad Ali Asek sebesar = 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 4. Hendrik, SP., Msi Sebesar = 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) 5. Siti Zahro, SE sebesar = 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) 5. Kuku Reksa Prabus. PD sebesar = 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) disini sangat jelas bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum tau pasti bahwa Hendrik, SP., Msi adalah orang yang diperintah bukan lah bermaksud memperkaya diri sendiri melainkan hanya orang yang disuruh

Halaman 96 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan terpaksa melakukan hal tersebut dikarenakan Tebanding melakukan dengan terpaksa karena dibawah tekanan pimpinanya yaitu Komisioner Panwaslu Muratara yaitu Sdr. Munawir dkk.

Dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding secara Substansi bukanlah Materi Banding sebagaimana yang dimaksudkan oleh hukum

Bahwa dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Surat Memori Banding tanggal 18 November 2022, adalah merupakan pengulangan atas berbagai argumentasi hukum yang telah disampaikan oleh Pembanding/dahulu Penuntut Umum pada saat pemeriksaan di Peradilan Tingkat Pertama dan bukan merupakan materi banding sebagaimana yang dimaksudkan oleh Hukum.

Oleh karena dalil-dalil keberatan dalam memori banding bukan merupakan banding sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum, maka sudah selayaknya secara hukum permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penuntut Umum patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas Terbanding Mohon Kiranya Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak pemohon banding yang diajukan oleh pembanding, atau setidaknya menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 51/Pid.SusTPK/2022/PN Plg;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Halaman 97 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 2 November 2022, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 2 November 2022, maka mengenai fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 98 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding yang merupakan dalil pengulangan sebagaimana telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama, oleh karena alasan-alasan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 2 November 2022 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dikuatkan ditingkat banding.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah yang dalam pemeriksaan ini terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 99 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 02 Nopember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Hendrik, SP., M.Si Bin Hadin dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami Supraja, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Mulyanto, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Abdullah Subur, SH., MH, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 40/PID.TPK/2022/PT.PLG, tanggal 25 November 2022 ditunjuk selaku majelis hakim untuk mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Asnawi, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

1. Mulyanto, S.H., M.H.

Supraja, S.H., M.H.

dto

2. Abdullah Subur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 100 dari 100 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG



dto

Asnawi, S.H., M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)